



**RENCANA STRATEGIS
KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

TAHUN 2020-2024

**KEDEPUTIAN
POLITIK DAN STRATEGI**



Kedepuitian Politik dan Strategi, Lt 3 Gedung A, Setjen Wantannas
Jl.Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat



**RENCANA STRATEGIS
KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024**

Jakarta, Mei 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	KONDISI UMUM.....	1
1.1.1	Hasil Capaian Kinerja Deputi Polstra Setjen Wantannas	2
1.1.2	Anggaran Polstra	3
1.1.3	Regulasi.....	3
1.2	POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	4
1.2.1	Potensi dan Permasalahan Global (Internasional-Regional).....	4
1.2.2	Potensi dan Permasalahan Nasional.....	12
1.2.3	Analisa Lingkungan Strategis (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT</i>).....	23
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI	26
2.1	VISI DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI.....	26
2.2	MISI DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI.....	26
2.3	TUJUAN DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI.....	26
2.4	SASARAN PROGRAM.....	27
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLSTRA SETJEN WANTANNAS.....	28
a.	Arah Kebijakan	28
b.	Strategi.....	28
3.2	ORGANISASI.....	29
3.2.1	Peran, Tugas, dan Fungsi Depolstra Setjen Wantannas.....	29
3.2.2	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	29
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
4.1	TARGET KINERJA.....	31
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	36
BAB V	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kehidupan nasional Indonesia dalam 5 tahun ke depan, diperkirakan akan diwarnai perubahan geopolitik dan geostrategi. Hal tersebut dapat berimplikasi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari berbagai sektor yang meliputi di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) baik eksternal maupun internal secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tataran lingkungan strategis eksternal terdapat perubahan jenis dan bentuk konflik yang dapat mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Sementara pada tataran lingkungan strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan *insecurity*. Dinamika lingkungan strategis tersebut menunjukkan semakin kompleksnya hakikat, sifat, dan bentuk ancaman sehingga dibutuhkan keuletan dan ketangguhan untuk pengembangan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi AGHT tersebut melalui kebijakan dan strategi yang terintegrasi dan tersinergi secara komprehensif dan holistik dari seluruh aspek kehidupan nasional.

Dari situasi dan kondisi tersebut guna mewujudkan penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional maka Sekertaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Wantannas dalam menciptakan kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis. Deputi Politik dan Strategi (Depolstra) yang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas telah menyelenggaraanya kegiatan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontijensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional. Pelaksanaan kegiatan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontijensi yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas saran tindak untuk dijadikan bahan rancangan ketapan kebijakan dan

strategi Dewan Ketahanan nasional sehingga harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Sesuai dengan amanat Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), maka Renstra Kedeputan Politik dan Strategi memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Renstra Deputi Politik dan Strategi tahun 2020-2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, RKA-KL, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Deputi Politik dan Strategi setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024.

1.1.1 Hasil Capaian Kinerja Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas

Pencapaian kinerja Tahun 2015-2019 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015-2019. Penjelasan pada Tabel 1 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Depolstra Setjen Wantannas 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun hasil Capaian Sasaran Program: Jumlah rumusan rancangan kebijakan dan strategi dalam bentuk naskah kajian siklus, dinamis, perkiraan cepat, seminar lokakarya, dan kajian daerah yang merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam 5 tahun, seperti terlihat pada table 1

Tabel 1
Capaian Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Politik Nasional			13	13	17	8	8	13	13	17	8	8
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Politik dan			13	13	19	7	7	13	13	19	7	7

Strategi Bidang Strategi Nasional											
Kegiatan 3: Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Rencana Kontinjensi		9	9	17	6	6	9	9	17	6	6

1.1.2 Anggaran Polstra

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Kedeputian Politik dan Strategi, untuk tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.181.106.000,- dengan realisasi mencapai Rp.4.076.378.700,- (97,50%), Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.767.199.000,- dengan realisasi mencapai Rp.3.873.473.000,- (81,61%), Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.650.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp.7.283.991.109,- (84,21%), untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.400.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp.2.237.777.400,- (93,24%) dan yang terakhir untuk tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.400.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp.2.325.967.250,- (96,92%).

1.1.3 Regulasi

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

- f. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- i. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020-2024.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis, Indonesia dihadapkan pada dinamika perubahan geopolitik dan geostrategis terhadap permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks baik global (internasional, regional) maupun nasional.

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Global (Internasional-Regional)

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia, persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di Kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di Kawasan. Amerika Serikat (AS) merespon Tiongkok dengan menggelar kekuatan di LTS. Persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan perumusan kerangka arsitektur regional. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Mudah-mudahan pergerakan aktor nonnegara secara transnasional membuat dinamika

ancaman nontradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia, yang menjadi perhatian besar adalah:

- a. Terorisme;
- b. Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia;
- c. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia;
- d. *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan
- e. Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu diperhatikan Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata cara global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan *unilateral*.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko pembangunan nasional. Selain permasalahan di atas, potensi lingkungan strategis global (internasional/regional) yang dihadapi terkait dengan Ketahanan Nasional, khususnya dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam adalah sebagai berikut:

a. Politik

Potensi

- 1) Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki pengaruh yang luas terhadap tata kelola pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif dalam menyampaikan aspirasi politik yang diwarnai oleh para elit politik dari berbagai Negara;
- 2) Masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di DK PBB membuka peluang untuk mengangkat aspirasi penciptaan stabilitas di berbagai kawasan termasuk upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah khususnya Palestina dan Israel; dan

- 3) Pergeseran polarisasi politik global membuka peluang aliansi baru bagi negara-negara di kawasan.

Permasalahan

- 1) Ego sektoral dalam sistem politik nasional yang lebih mengedepankan kepentingan internal negara daripada kepentingan bilateral dan multilateral menimbulkan ketidakpastian dalam penguatan kerja sama regional maupun kawasan; dan
- 2) Perbedaan dalam sistem pemerintahan dan aliran politik *the ruling class* di setiap negara menjadi penghambat dalam membangun efektifitas kerja sama lintas negara.

b. Hukum

Potensi

- 1) Semakin intensifnya kerja sama melalui organisasi internasional dan regional membuka ruang komunikasi untuk penyesuaian kepentingan guna melancarkan kerja sama lintas negara; dan
- 2) Semakin besarnya pengaruh sistem transportasi dan komunikasi serta informasi dalam bingkai kepentingan bersama masyarakat bangsa mendorong kebutuhan pengaturan bersama guna pencapaian kepentingan bersama.

Permasalahan

- 1) Perbedaan sistem hukum dan pandangan politik pada kelembagaan pemerintahan di masing-masing negara menyebabkan terhambatnya perumusan kesepakatan yang dapat saling mengikat dan saling menguntungkan kendati telah ada hukum internasional sebagai instrumen penyelesaian konflik hukum dan politik antarnegara; dan
- 2) Berkembangnya gejala pandangan politik personal kepala pemerintahan di masing-masing negara mempengaruhi fleksibilitas kebijakan yang diselenggarakan oleh suatu negara.

c. Keamanan

Potensi

- 1) Abad ke-21 ditandai dengan dominasi kepentingan ekonomi guna kesejahteraan bangsa-bangsa sehingga kemungkinan perang terbuka antarnegara relatif kecil, potensial untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan; dan
- 2) Kemajuan teknologi persenjataan di banyak negara menyebabkan meningkatnya kehati-hatian untuk menimbulkan konflik bersenjata secara terbuka sebab risikonya yang sangat besar, lebih diarahkan kepada efek penangkalan.

Permasalahan

- 1) Berkembangnya pengaruh radikalisme dan ketidakpuasan serta kecemburuan dalam kawasan menjadi sumber ancaman keamanan di berbagai Negara; dan
- 2) Dominasi negara-negara “berpengaruh” pada lembaga-lembaga internasional sehingga memungkinkan terjadinya pengabaian atas keputusan bersama melalui lembaga internasional.

d. Ekonomi

Potensi

- 1) Revolusi industri 4.0 yang telah direspon secara proaktif oleh Kementerian Perindustrian membuka peluang luas untuk memanfaatkan produk-produk manufaktur utamanya otomotif, elektronik, garmen, kimia untuk mengisi pasar ekspor baru, tanpa mengabaikan ekspor energi batu bara yang masih memiliki prospek cukup baik untuk mendapatkan devisa;
- 2) Percepatan kelancaran Sistem Logistik Nasional (Sislognas) setelah terhubungnya kegiatan ekonomi antarpulau, merupakan peluang untuk mendorong peningkatan/ pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3) Pendayagunaan potensi yang terkandung dalam wilayah laut beserta isinya memberikan peluang yang luas bagi terselenggaranya kegiatan kemaritiman mulai dari

perdagangan lewat laut, pelayaran/perkapalan/transportasi laut, *bulk carrier, super tanker, cargo, oil, public good*, penelitian, pertambangan bawah laut, perikanan laut, pelestarian lingkungan laut dan pertolongan bencana;

- 4) Perluasan pembangunan infrastruktur berorientasi pada multimoda membuka peluang berkembangnya sentra produksi ekonomi baik di kawasan pesisir pulau-pulau kecil maupun di wilayah pedalaman, keseluruhannya berorientasi pada ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan pasar domestik;
- 5) Penguatan perdagangan antarnegara pada forum Indo Pasifik, *ASEAN-China Free Trade Agreement (CAFTA)*, *APEC*, merupakan peluang untuk memperdagangkan produk manufaktur andalan (otomotif, elektronik, garmen, dan kimia) untuk mengisi pasar ekspor baru;
- 6) Pengembangan RI 4.0 yang telah dirintis oleh Kementerian Perindustrian merupakan peluang dan *pilot project* bagi pengembangan agro industri, agribisnis, industri otomotif berbasis robot, industri elektronik berbasis *nano tech*;
- 7) Perluasan keterbukaan informasi sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia maya semakin membuka peluang tersedianya berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan nilai tambah dan daya saing untuk industri RI 4.0;
- 8) Pertumbuhan sektor jasa di atas rata-rata pertumbuhan nasional (di atas 6%), membuka peluang berkembangnya usaha jasa produktif, dan membuka peluang bagi penduduk usia muda memenuhi tuntutan ketenagakerjaan sektor jasa; dan
- 9) Percepatan globalisasi dengan segala aspeknya semakin memberi peluang untuk mempercepat mobilitas orang, jasa, keuangan, dan barang yang didukung oleh kemudahan pariwisata, komunikasi, transportasi, dan perdagangan.

Permasalahan

- 1) Peranan perwakilan perdagangan RI di luar negeri yang belum merata sampai menjangkau pasar ekspor baru, merupakan kendala dalam perluasan dan intensifikasi perdagangan RI khususnya dalam upaya pemasaran produk manufaktur;
- 2) Penolakan dari sementara pihak di Eropa dan Amerika terhadap produk primer sawit merupakan kendala dalam pemasaran produk primer, sebaliknya produk hilir masih mungkin diperdagangkan;
- 3) Posisi dan kondisi geografis yang beragam dan berada pada posisi *ring of fire*, merupakan kendala karena rawan terhadap bencana alam, banyaknya wilayah *remote area*, memerlukan dukungan sarana transportasi dan komunikasi guna memperlancar kegiatan ekonomi;
- 4) Persebaran masyarakat maritim Indonesia di wilayah pesisir, pulau, kepulauan belum secara merata memiliki kesadaran akan budaya maritim, penguasaan teknologi dan industri kemaritiman masih terbatas di pelabuhan-pelabuhan besar, tenaga kerja kemaritiman masih terbatas kepada kepelautan, di samping itu persyaratan kompetensi pelaut Indonesia belum memenuhi standar kompetensi pelaut internasional, merupakan kendala dalam pengembangan MDA;
- 5) Pemenuhan kebutuhan investasi besar asing dan domestik berorientasi pada teknologi tinggi sesuai tuntutan RI 4.0 yang masih minim merupakan kendala bagi pembangunan sentra produksi ekonomi baik di kawasan pesisir, maupun di wilayah pedalaman dan pulau-pulau besar kecil;
- 6) Penguatan tingkat kepercayaan para mitra (*trust building*), dan *soft approach* memerlukan *economy cost* cukup tinggi masih merupakan kendala dalam membangun kemitraan saling menguntungkan perdagangan antarnegara;
- 7) Pengembangan potensi ketenagakerjaan belum didukung oleh fasilitas *Training of Trainer* (ToT) dan penetapan standar

sertifikasi ketenagakerjaan merupakan kendala dalam mengisi pasar tenaga kerja sesuai tuntutan RI 4.0;

- 8) Pengembangan produk industri hilir belum didukung oleh tenaga profesional domestik, keterampilannya belum didukung oleh sertifikasi dan dianggap berada pada sektor informal merupakan kendala dalam mengisi pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri, dalam persaingan dengan tenaga profesional asing; dan
- 9) Percepatan globalisasi dengan segala aspeknya merupakan kendala bagi keabsahan batas fisik antarnegara implikasinya semakin menurunkan tugas peran dan fungsi pemerintahan negara, cenderung mengarah kepada neoliberalisme.

e. Sosial Budaya

Potensi

- 1) Pengembangan kecerdasan buatan sebagai konsekuensi kehadiran teknologi digital membuka peluang kemudahan pengenalan preferensi konsumen;
- 2) Pengembangan informasi mutakhir semakin membuka peluang *long distance learning*, peserta didik semakin aktif mengikuti informasi mutakhir, mempercepat peningkatan kemahiran/profesionalisme sesuai bakat/minatnya;
- 3) Perluasan FoMo (*Fear of Moving Out*-khawatir ketinggalan informasi mutakhir), membuka peluang bagi para peminat keterbukaan informasi untuk semakin giat mencari dan memperoleh (setelah disensor secara proaktif) informasi relevan dan mutakhir dengan perkembangan kehidupan masyarakat antarbangsa;
- 4) Percepatan modernisasi dan westernisasi semakin membuka peluang berkembangnya gaya hidup metropolis dari generasi milenial. Hal positif yang cukup mengemuka adalah berkembangnya kreatifitas, produktifitas, inovasi untuk mengembangkan produk baru berkualitas;

- 5) Pengembangan *realizing society* 5.0 merupakan realitas yang semakin membuka peluang bagi kehidupan masyarakat antarbangsa untuk mengikuti kemajuan pola hidup masyarakat Jepang yang semakin modern, mengembangkan *smart living* namun tetap mampu mempertahankan adat dan budaya asli yang dikenal sebagai “bushido”;
- 6) Peningkatan tuntutan sepuluh *skill*/keterampilan baru memiliki peluang cukup besar dengan berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI), otomatisasi dan perkembangan teknologi digital;
- 7) Pengembangan keterampilan baru dari masyarakat penikmat *long distance learning* berbasis internet membuka peluang berkembangnya lapangan pekerjaan baru yang belum dikenal sebelumnya;
- 8) Peningkatan kesadaran manusia akan pentingnya nilai kemanusiaan berbasis pada *human security* dan *human rights* merupakan peluang yang cukup besar bagi golongan minoritas untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat mayoritas dalam kedudukan setara; dan
- 9) Peningkatan sampah produk yang dikategorikan kadaluwarsa (*obsolete*) menjadi komoditi ekspor relatif murah dari negara tertentu, membuka peluang bagi masyarakat tertentu untuk memperoleh kebutuhannya.

Permasalahan

- 1) Peningkatan tuntutan kemajuan teknologi industri yang menyertai perkembangan RI 4.0 dan belum diikuti oleh kemampuan SDM merupakan kendala bagi tenaga kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja berbasis RI 4.0;
- 2) Penurunan kualitas hubungan kekeluargaan antara orang tua, anak dan saudara, sebagai dampak negatif dari keterbukaan informasi seperti kecanduan internet, berkembangnya sikap individualistis/kurang peduli terhadap lingkungannya,

merupakan kendala bagi penguatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 3) Peningkatan kecemasan sosial dan FoMo karena ketinggalan untuk memperoleh informasi mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu mengikuti modernisasi, westernisasi, dan *disruptive technology*, merupakan kendala dalam pemeliharaan karakter bangsa;
- 4) Pengaruh negatif *realizing society 5.0* dan Revolusi Industri/RI 4.0 bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti dinamika perkembangannya dapat menimbulkan gegar budaya merupakan kendala dalam mempertahankan budaya lama dan budaya baru belum mapan;
- 5) Percepatan perubahan yang disebabkan oleh revolusi teknologi, *nanotechnology*, *nanorobotics*, merupakan kendala jika tidak diikuti oleh pola pikir dan pola sikap kritis sehingga dapat menimbulkan kecemasan sosial;
- 6) Perkembangan individual *long distance learning* akan mendorong penurunan peran dan fungsi lembaga pendidikan formal, merupakan kendala bagi lembaga pendidikan untuk mempertahankan *atribut world class university*; dan
- 7) Perkembangan politik identitas, radikalisme, dan fanatisme sempit, merupakan kendala bagi penguatan *human security* dan *human rights*.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Nasional

Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Intoleransi yang menguat ditandai dengan tren penolakan pemimpin yang berbeda agama. Selain itu, politik identitas digunakan oleh calon kepala daerah dalam pilkada di beberapa daerah. Indeks demokrasi Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan demokrasi kesenjangan sipil, hak-hak politik, dan

lembaga demokrasi. Tantangan lain yang di hadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi hal ini ditandai dengan masih adanya kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu masih adanya kelompok kriminal bersenjata yang mengancam kedaulatan negara seperti di Papua. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko pembangunan nasional. Selain permasalahan di atas, potensi lingkungan strategis global (internasional/regional) yang dihadapi terkait dengan Ketahanan Nasional, khususnya dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam sebagai berikut:

a. Politik

Potensi

- 1) Pemahaman dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat dalam penerimaan empat konsensus dasar nasional berpartisipasi dalam kehidupan nasional tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam kaderisasi bela negara didukung oleh: (a) Penetapan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara; dan (b) Tersusunnya Modul Utama pedoman nasional untuk penyelenggaraan program bela negara sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- 2) Peningkatan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengatasi dan keluar dari permasalahan konflik sosial dan politik serta ancaman bencana, didukung oleh komitmen TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada berbagai dinamika dan gangguan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat berbasis pada UU tentang TNI, UU tentang Polri

dan bantuan kekuatan TNI kepada Polri serta penanggulangan bencana sesuai dengan OMSP; dan

- 3) Perluasan jangkauan infrastruktur dan sistem ekonomi pasar, berkembangnya sistem informasi dan komunikasi dalam layanan satu pintu sehingga membuka peluang layanan yang lebih lancar bagi masyarakat di daerah dan pengembangan daerah tanpa harus melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Permasalahan

- 1) Belum terbangunnya jiwa sportivitas dalam berdemokrasi melalui pemilihan umum, indikatornya antara lain berkembangnya fenomena radikalisme yang memanfaatkan situasi transisi politik untuk mencapai tujuan kelompok.
- 2) Hasrat kekuasaan dan perluasan simpul-simpul partai politik serta semangat lokal kedaerahan sebagai aktualisasi “putra daerah” dapat menghambat penguatan moratorium DOB; dan
- 3) Pembudayaan semangat bela negara belum efektif, belum terwujudnya standardisasi program dan nomenklatur kegiatan bela negara secara nasional dan keterbatasan rentang waktu Inpres Nomor 7 Tahun 2018, yang hanya berlaku sampai tahun 2019.

b. Hukum

Potensi

- 1) Telah tersusunnya sistem nasional pencatatan kedatangan orang asing pada pintu-pintu kedatangan (*entry point*), didukung oleh terbentuknya tim PORA mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan (2.690 tim);
- 2) Berkembangnya sistem *e-government* dalam tata kelola pemerintahan/reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, didukung oleh peningkatan kinerja lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi (Saber Pungli, dll);

- 3) Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI yang Komprehensif, terbentuknya “Portal Peduli WNI” sebagai *platform* layanan dan perlindungan WNI yang memiliki *database* WNI di luar negeri dan semakin baiknya hubungan Pemerintah RI dengan berbagai negara di kawasan;
- 4) Komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjadikan kawasan terumbu karang sebagai objek wisata, didukung oleh UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewenangannya mencakup pengaturan wilayah perikanan dan terumbu karang;
- 5) Komitmen pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), menjangkau seluruh wilayah nasional, tercermin dari Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar), khusus untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diupayakan secara bertahap mulai dari kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- 6) Komitmen pemerintah untuk merevisi jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perihal hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) dan asas manfaat dalam pemberian BVKS terhadap orang asing, utamanya negara tertentu yang tidak memberikan manfaat secara signifikan terhadap kepentingan perekonomian Indonesia.

Permasalahan

- 1) Pengawasan PORA masih mengalami: (a) belum efektifnya sistem pengawasan orang asing secara terintegrasi sejalan dengan peningkatan jumlah pintu *entry* orang asing; (b) keterbatasan jumlah aparat dan satuan kerja (125 Kantor Imigrasi) yang belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja keimigrasian; (c) belum terdukungnya koneksitas Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada seluruh *entry point* WNA secara nasional mengawasi rentang *locus delicti* pelanggaran hukum WNA; (d) belum meratanya pengawakan dalam pelaksanaan tugas fungsi instansi vertikal Kemenkum HAM cq. Ditjen Keimigrasian tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian pada *entry point* WNA di daerah tertentu, untuk mendapat dukungan dari Pemda;
- 2) Komitmen pemerintah dalam memantau dana WNI di bank luar negeri, telah didukung oleh MLA namun masih lemah dalam mengembangkan komunikasi saling percaya dalam bentuk *Central Authority* (CA) Indonesia dengan negara-negara terkait, selain itu masih adanya negara tertentu yang menutup diri dari perjanjian kerja sama MLA;
- 3) Pemberantasan korupsi berbasis pada efektifitas dan efisiensi masih dihadapkan pada putusan pengadilan yang belum memberikan efek jera karena belum konsisten mengadili korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan masih adanya fenomena intervensi kekuatan politik dalam melindungi perilaku koruptif;
- 4) Komitmen pemerintah dalam perlindungan WNI di luar negeri belum optimal antara lain mengalami kendala dalam Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku otoritas terkait dan pengawasan aktivitas ilegal TKI ke luar negeri;
- 5) Optimalisasi pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih adanya tarik menarik kepentingan antar institusi vertical; dan

- 6) Optimalisasi pemberantasan narkoba masih mengalami hambatan karena belum terbangunnya pemahaman yang sama terhadap implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kelambatan penerbitan dasar hukum pelarangan untuk pemberantasan jenis produk yang dikategorikan narkoba, belum samanya persepsi tentang rehabilitasi pengguna narkoba serta belum efektifnya sistem sanksi hukum terhadap pengguna, pengedar, dan penegak hukum yang terlibat dalam pemakaian dan peredaran narkoba.

c. Keamanan

Potensi

- 1) Penguatan kelembagaan TNI-Polri mulai pusat sampai dengan daerah, didukung infrastruktur memperkuat potensi pengelolaan keamanan dalam negeri dan keamanan ketertiban nasional serta meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam membantu pemberantasan terorisme;
- 2) Komitmen pemerintah dalam pembangunan untuk semua termasuk didalamnya daerah perbatasan, didukung pembangunan infrastruktur, optimalisasi pengawasan keamanan di perbatasan, dan intensitas kerja sama dengan negara tetangga;
- 3) Komitmen pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan SDA kelautan antara lain pemberantasan *illegal fishing* sesuai: (a) Ketentuan FAO mengenai *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF); (b) Pembentukan *Regional Plan of Action* (RPOA) di wilayah ASEAN dan Australia; (c) Terbentuknya Satgas 115 untuk pemberantasan IUU *fishing* secara terpadu

didukung oleh penguatan armada pengawasan wilayah laut yurisdiksi nasional;

- 4) Komitmen pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas fungsi FIR yang semula dikelola oleh Singapura antara lain terkait terbukanya peluang Pemerintah Indonesia untuk mengambil kewenangan pengelolaan wilayah udara sejauh memenuhi aturan internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), penyiapan penguasaan teknologi pengendalian lalu lintas udara, kepercayaan lembaga penerbangan internasional terhadap manajemen keselamatan penerbangan Indonesia, peningkatan kualitas SDM seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi;
- 5) Penyelesaian masalah Papua difokuskan pada konsistensi kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan SDM-OAP di Papua dan Papua Barat, berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang signifikan di Papua untuk peningkatan kesejahteraan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat lokal terhadap kehidupan nasional Indonesia, semakin berkurangnya internasionalisasi pemecahan masalah dalam negeri Indonesia di Papua; dan
- 6) Optimalisasi bantuan kekuatan TNI-Polri dalam *quick responses* terhadap kebencanaan berbasis pada jiwa kejuangan yang terpatri pada kesatuan TNI-Polri yang sudah terbiasa dengan medan sulit.

Permasalahan

- 1) Berkembangnya pemahaman agama secara sempit yang menganggap cara-cara teror sebagai jihad agama, diperkuat dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dan hasutan ketimpangan dalam kehidupan sosial untuk propaganda ajaran radikal;
- 2) Pengelolaan wilayah perbatasan (darat, laut, dan udara) masih dihadapkan pada ketergantungan komitmen pengamanan bersama, kepentingan nasional negara tetangga, keterbatasan

sumber daya dan anggaran dalam pengelolaan bentang wilayah perbatasan negara yang dapat menjadi pintu masuk kegiatan ilegal serta masih adanya keterbatasan KISS dalam pemantauan aktivitas *illegal fishing* dalam wilayah laut yurisdiksi nasional;

- 3) Penyelesaian kepastian perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada belum terbangunnya kesamaan persepsi dengan negara tetangga tertentu terhadap UNCLOS 1982, belum mantapnya kesepakatan regional tentang wilayah laut yurisdiksi nasional dengan negara tetangga;
- 4) Persiapan pengambilalihan FIR dari Singapura masih menghadapi masalah belum terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan ICAO, belum adanya rekomendasi dari ICAO kepada Indonesia dalam pengelolaan penerbangan sipil pada seluruh wilayah udara yurisdiksi nasional Indonesia karena belum terpenuhinya persyaratan ICAO;
- 5) Penyelesaian damai masalah Papua masih dihadapkan pada terbatasnya sosialisasi dan pemahaman OAP terhadap proses ilegal integrasi Papua ke dalam NKRI, masih rendahnya kualitas SDM-OAP dalam memahami makna negara kesatuan dan manfaat Pemerintah RI dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua; dan
- 6) Realisasi penanggulangan kebencanaan masih menghadapi masalah belum tegasnya sistem, doktrin, status, dan dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas OMSP TNI pada proses mitigasi dan penanggulangan bencana nasional, belum terlatihnya masyarakat dalam mewaspadaai kemungkinan bencana sesuai kearifan lokal dan respon cepat menghadapi peristiwa bencana serta belum terbangunnya kesiapan lembaga daerah dalam *quick response* terhadap penanggulangan bencana.

d. Ekonomi

Potensi

- 1) Pengembangan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya di berbagai wilayah, membuka peluang berkembangnya mobilitas manusia, barang, dan perluasan sarana transportasi multiguna;
- 2) Penguatan MDA dalam pembangunan kemaritiman dihadapkan pada luasnya laut Indonesia dibanding daratan beserta kekayaan di dalamnya, membuka peluang pembangunan sarana transportasi laut yang lebih efisien dan murah;
- 3) Pertumbuhan sektor jasa formal telah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional membuka peluang peningkatan sektor jasa informal untuk memperoleh standar kualifikasi/sertifikasi;
- 4) Penguatan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5%, didukung oleh penguatan seluruh sektor ekonomi nasional;
- 5) Percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk memenuhi amanat UUD NRI 1945;
- 6) Percepatan pembangunan poros maritim dunia dan tol laut berbasis pada transportasi multimoda dan pembudayaan *Maritime Domain Awareness* (MDA), didukung oleh pendayagunaan tol langit yang baru diluncurkan; dan
- 7) Posisi dan kondisi geografis yang beragam dan berada pada posisi *ring of fire*, merupakan wilayah yang berpotensi wisata, sumber kekayaan alam.

Permasalahan

- 1) Peningkatan kebutuhan devisa untuk pembiayaan pembangunan dan masih besarnya ketergantungan pada ekspor komoditi primer serta semakin besarnya defisit perdagangan, merupakan kendala dalam peningkatan dinamika dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Produktivitas industri manufaktur domestik cenderung menurun (deindustrialisasi prematur), karena instrumen pendukung industri sebagian besar *obsolete*, merupakan kendala bagi

ekspor produk komoditas Indonesia oleh barang primer dan belum didukung oleh produk olahan sehingga kurang memiliki nilai tambah ekonomi; dan

- 3) Posisi dan kondisi geografis yang berada pada posisi *ring of fire* merupakan kendala untuk penyiapan mitigasi, resiko bencana, dengan konsekuensi ekonomi yang tidak murah.

e. Sosial Budaya

Potensi

- 1) Peningkatan kesadaran akan keunggulan budaya Indonesia yang beraneka ragam, merupakan peluang untuk mengembangkan program pendidikan berkarakter dan budi pekerti baik formal maupun nonformal;
- 2) Posisi dan kondisi geografis pada *ring of fire*, merupakan peluang untuk mengembangkan berbagai kekayaan sosial dan budaya;
- 3) Pengamalan nilai agama sesuai hakikat untuk menciptakan kedamaian umat manusia merupakan peluang untuk memperkuat demokrasi dan konsolidasi politik;
- 4) Peningkatan angka kelahiran atau *baby booming*, dan peningkatan angka harapan hidup, merupakan peluang untuk memperoleh angkatan kerja produktif;
- 5) Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan konsep pembangunan infrastruktur SDM didukung oleh pendayagunaan *e-learning* dan pendidikan vokasi; dan
- 6) Penanggulangan kesenjangan antarwilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pembangunan wilayah 3T.

Permasalahan

- 1) Percepatan reformasi birokrasi pemerintahan, masih dihadapkan pada kebiasaan birokrasi lama, merupakan kendala karena rawan praktik KKN, *paper work*, dan rantai layanan yang panjang;

- 2) Posisi dan kondisi geografis pada *ring of fire*, menjadi kendala dalam merumuskan program pembangunan sosial dan budaya dan posisi *remote area* membutuhkan sarana komunikasi, transportasi yang mampu menjangkau wilayah tersebut; dan
- 3) Penurunan pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila pada sebagian kalangan generasi muda dan/atau sivitas akademika, merupakan kendala bagi peningkatan kualitas politik nasional agar tetap sesuai dengan demokrasi Pancasila dan mendorong peningkatan pemahaman generasi milenial.

Selain berbagai permasalahan dan tantangan di atas, Indonesia juga pada pergeseran tren pertahanan ditunjukkan dengan adanya proliferasi persenjataan dan eskalasi ancaman perang nonkonvensional. Untuk menghadapi ancaman perang nonkonvensional, Indonesia secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif, misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi (sebagai contoh, dalam menyelesaikan masalah Papua saat ini dibutuhkan sinergitas dan soliditas berbagai aktor seperti TNI, Polri, BIN, Imigrasi, Ekonomi, Sosial Budaya, Akademisi, dan lain-lain). Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih lemah akibat dari kurangnya kerja sama dan koordinasi antar institusi.

Dalam perspektif keamanan nasional, muncul potensi ancaman yang semakin variatif dan multidimensional sehingga memerlukan pengelolaan keamanan nasional oleh lembaga-lembaga terkait secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan Dewan Keamanan Nasional yang mampu merumuskan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegratif. Amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, terdapat rencana

pembentukan DKN yang sampai saat ini masih belum terwujud. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang telah ada, diharapkan dapat mempercepat perwujudan DKN.

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*)

Analisa Lingkungan Strategis Polstra mengacu pada Renstra Wantannas tahun 2020-2024 dengan berbagai dinamika lingkungan strategis di atas perlu disikapi oleh Deputi Politik dan Strategi (Polstra) Setjen Wantannas agar dapat menjadi suatu peluang, bukan ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, Wantannas sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan ketahanan nasional perlu meningkatkan peran dan fungsinya dengan menjadikan pengaruh lingkungan strategis tersebut sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan melalui analisa SWOT. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Wantannas ke depan agar tujuan dan sasaran organisasi Wantannas dalam Renstra Periode 2020-2024 dapat terwujud. Adapun hasil rangkuman analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2
ANALISIS SWOT

SWOT	HASIL PEMBAHASAN	
1	2	
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	1	Dukungan dan kepercayaan masyarakat dan lembaga
	2	Tugas dan fungsi Wantannas yang sangat strategis
	3	Arahan Presiden tentang penguatan Wantannas untuk bela negara
	4	Koordinator aksi nasional Bela Negara
	5	Memiliki sistem informasi yang memadai
	6	Memiliki kredibilitas dalam pengabdian sejak berdirinya NKRI
	7	Kualitas SDM yang memadai

SWOT	HASIL PEMBAHASAN		
1	2		
<p><i>Weaknesses</i> (Kelemahan)</p>	1	Pembinaan ketahanan nasional belum terukur	
	2	Belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional	
	3	Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas sudah tidak relevan	
	4	Belum optimalnya koordinasi dengan anggota Dewan	
	7	Manajemen kinerja yang belum optimal	
	8	Terbatasnya anggaran	
	9	Belum terealisasi pelaksanaan Sidang Dewan	
	10	Belum adanya Inspektorat	
	11	Belum adanya peraturan terkait Pedoman Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal	
	12	Jumlah SDM yang belum memadai	
	<p><i>Opportunities</i> (Kesempatan)</p>	1	Belum adanya alat ukur tentang pembinaan ketahanan nasional
		2	Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis
3		Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas layanan publik	
4		Koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pembangunan daerah	
5		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
6		Rencana perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional	
7		RPJMN mengamanatkan adanya rencana aksi Bela Negara	
<p><i>Threats</i> (Ancaman)</p>	1	Belum ditetapkannya peraturan perundangan tentang Rencana Aksi Bela Negara	
	2	Beberapa Intansi Pemerintah juga menyusun kajian rekomendasi kebijakan kepada Presiden	
	3	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional belum disahkan	
	4	<i>Belt Road Initiative</i> dari Tiongkok	
	5	Polarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di Kawasan Timur (Asia)	

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut, maka untuk menghadapi kondisi lingkungan strategis yang semakin kompleks, Wantannas perlu memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman atau risiko yang akan dihadapi, melalui:

- a. Merevisi Keppres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Merumuskan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja Wantannas dan Setjen Wantannas disesuaikan dengan tupoksi, visi, dan misi Presiden;
- c. Mempercepat pengesahan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional;
- d. Mempercepat pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional, dengan menyelenggarakan Sidang Dewan;
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Wantannas dan Setjen Wantannas; dan
- g. Memperkuat pembinaan Ketahanan Nasional melalui penetapan kebijakan dan strategi, pengukuran dan pemantauan kondisi kehidupan dan pembangunan nasional serta aksi Bela Negara secara terstruktur, sistematis dan masif.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN POLSTRA SETJEN WANTANNAS

2.1. VISI DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS

Merujuk visi Wantannas yang merujuk pada visi Presiden dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Yaitu “Dewan Ketahanan Nasional yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Maka visi Depolstra ***Menjadi unsur pembantu pimpinan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan masukan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional terkait dengan aspek politik nasional, strategi nasional dan rencana kontijensi.***

2.2. MISI DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS

Depolstra Setjen WANTANNAS melaksanakan Misi Dewan Ketahanan Nasional dengan uraian sebagai berikut: Adalah melaksanakan pengamatan, pengukuran dan evaluasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, terhadap politik nasional, strategi nasional dan rencana kontijensi.

2.3. TUJUAN DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS

Dalam mewujudkan misi Wantannas telah menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi pembinaan Ketahanan Nasional fokus pada bidang politik nasional, strategi nasional dan rencana kontijensi melalui perumusan rancangan kebijakan dan strategi mengantisipasi hasil pengamatan dan pengukuran segenap kondisi kehidupan dan pembangunan nasional guna pembinaan ketahanan nasional dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
- b. Membantu Sesjen Wantannas dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Setjen Wantannas.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam sasaran Program.

2.4. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Polstra Setjen Wantannas, dan merupakan *output* dari semua program kegiatan di Deputi Politik dan Strategi. Sasaran program ditujukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Depolstra Setjen Wantannas menetapkan sasaran program sebagai berikut: Terumuskannya rancangan Kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis.

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a. Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang;
- b. Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden;
- c. Persentase perumusan Perkiraan Batas Toleransi Resiko Pembangunan yang disiapkan untuk bahan masukan pengambilan keputusan; dan
- d. Persentase Kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN ORGANISASI.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI.

- a. Arah kebijakan: Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Politik dan Strategi.
- b. Strategi:
 - 1) Penyelenggaraan evaluasi, analisis, dan perumusan politik nasional;
 - 2) Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan strategi nasional dalam rangka pemecahan masalah pembangunan nasional;
 - 3) Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional;
 - 4) Penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional;
 - 5) Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; dan
 - 6) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan.

3.2 Organisasi

3.2.1 Peran, Tugas, dan Fungsi Depolstra Setjen Wantannas

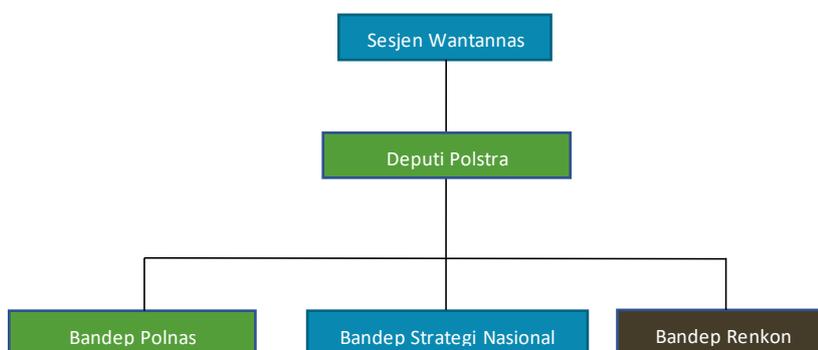
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dijelaskan bahwa Setjen Wantannas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

3.2.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas, sebagai berikut:

**Gambar Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**



Organisasi Polstra Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu: Bandep Politik Nasional; Bandep Strategi Nasional; Bandep Rencana Kontijensi.

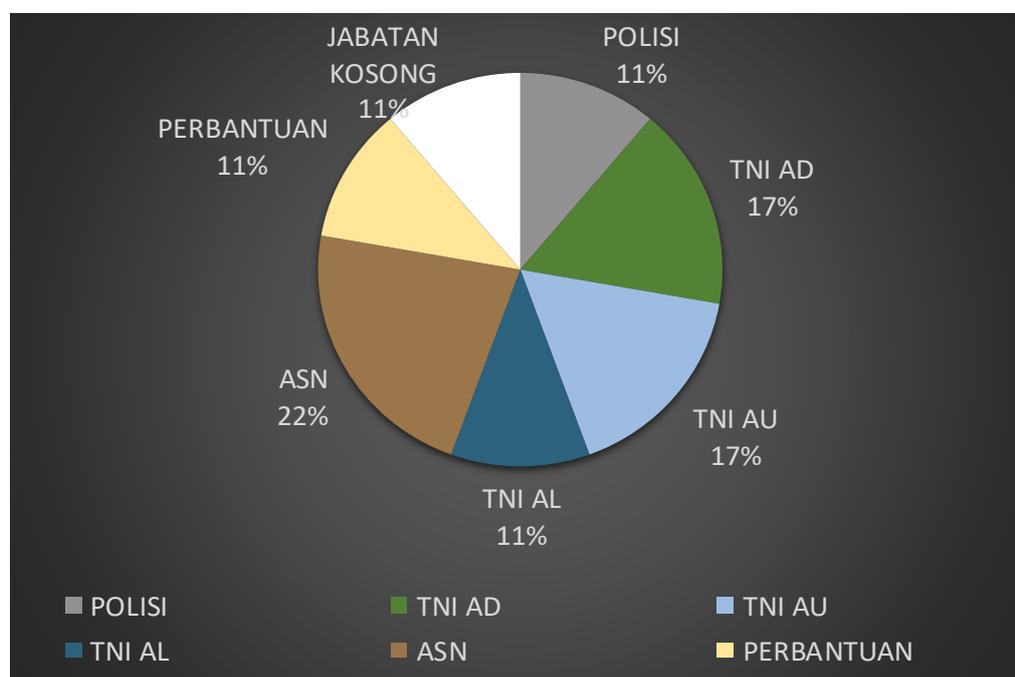
Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Maret 2020, kekuatan sumber daya manusia Depolstra Setjen Wantannas adalah sebanyak 15 orang, terdiri atas 3 pegawai organik, 12 pegawai perbantuan.

Tabel 3
Profil Sumber Daya Deputi Politik dan Strategi

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	NON S1	
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon I.a	-	1	-	-	1
2	Eselon II.a	-	7	1	1	9
3	Eselon II.b	-	1	-	-	1
4	Eselon III	-	-	-	-	-
5	Eselon IV	-	-	-	-	1
6	Fungsional Umum	-	-	-	-	2
7	Tenaga Kebersihan	-	-	-	2	2
Jumlah Total						16

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Capaian kinerja Depolstra Setjen Wantannas diukur berdasarkan capaian sasaran program dan capaian kegiatan. Indeks capaian setiap IKP, dan IKK ditetapkan berdasarkan skala ordinal, dimana intepretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi presentasi 100% dan paling rendah tidak berhasil jika kurang dari 30%. Rincian capaiannya sebagai berikut:

NO	SKALA NILAI ORDINAL	INTEPRETASI KESIMPULAN
1	2	3
1	≥100%	Sangat Berhasil
2	80% – 100%	Berhasil
3	70% – 79,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 69,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

$$\text{Rumus pencapaian} = \frac{\text{Total Pencapaian}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Sasaran Program dan kegiatan Depolstra Setjen Wantannas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan erjasama adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Program Teknis

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Kebijakan dan strategi ketahanan nasional.	Terumuskannya rancangan Kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang	80%	80%	80%	80%	80%

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	tangguh dan dinamis	disiapkan untuk bahan prasidang					
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase perumusan Perkiraan Batas Toleransi Resiko Pembangunan yang disiapkan untuk bahan masukan pengambilan keputusan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	85%	85%	85%	85%	85%

Tabel 5
Kegiatan Deputi Politik dan Strategis

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Politik Nasional	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional	Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan	1	1	2	2	2

Perumusan Kebijakan Strategi Nasional	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang politik nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3
	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang strategi nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan	1	1	1	1	1
	Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	1	1	1	1	1
	Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9

	Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	1	1	2	3	3
--	---	--	---	---	---	---	---

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 maka Indikasi pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Program Depolstra Setjen Wantannas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Kegiatan Teknis
Deputi Politik dan Strategi

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Politik Nasional	5,4	5,4	5,6	5,8	6
Perumusan Kebijakan Strategi Nasional	4,6	4,6	4,8	5	5,2
Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi	4,7	4,7	4,9	5,1	5,3

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Politik dan Strategi Setjen Wantannas periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Depostr Setjen Wantannas untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Polstra Setjen Wantannas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Setjen Wantannas termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Depolstra Setjen Wantannas.

Renstra Depolstra Setjen Wantannas periode 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi kegiatan staf Depolstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Staf dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Deputi Politik dan Strategi
Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.
Inspektur Jenderal Polisi

Format Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Politik Nasional													BANDEP POLNAS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan		1	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang politik nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan Kondisi kehidupan nasional bidang politik nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang politik nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang politik nasional yang dihasilkan		1	2	3	3	3						
Kegiatan 2 Perumusan Kebijakan Strategi Nasional													BANDEP STRANAS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan dan strategi nasional yang dihasilkan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama untuk penyusunan rencana kontinjensi yang dihasilkan		1	2	3	3	3						



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024**